Jurnal of Islamic Pedagogy and Education Development

| Volume 2, Issue 2, 2026 | Page 40-53 |
ISSN-Online: XXXX-XXXX
This work is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

ANALISIS KESIAPAN PROGRAM MODERASI BERAGAMA DI LINGKUNGAN MADRASAH

Anita Intan Romatuzzahroh[1], Diana Monita[2], Cahya Arrum Manggali [3]

[13]Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

[2]Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu, Indonesia

anitazahroh1@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:
religious moderation; schools; madrasas; policy readiness; implementation

ABSTRACT

Schools and madrasas are strategic spaces for fostering religious moderation through teaching, school culture, educators' role modelling, and institutional policies. This article examines the readiness of schools/madrasas, civil servants, and policy implementers to fulfil the aims of the religious moderation programme. The study uses a descriptive qualitative approach and an open-ended questionnaire comprising 35 questions administered to teachers in several schools/madrasas. Data were analysed descriptively through data reduction, data display, and conclusion drawing, following the Miles and Huberman model. The findings indicate that institutional readiness is uneven. Some supporting conditions are present, including general understanding of religious moderation, implementers' commitment, and access to technology in many institutions. Nevertheless, weaknesses remain in coordination, written guidance and standard operating procedures, budget planning, evaluation criteria, regular evaluation, and partnerships with external stakeholders. The programme therefore requires stronger governance, clearer allocation of responsibilities, adequate resources, and continuous evaluation so that religious moderation becomes a sustained educational practice rather than an administrative formality.

Received: 11/07/2026 **Revised:** 29/08/2026 **Accepted:** 25/10/2026

PENDAHULUAN

Tahun 2019 menjadi awal dicetuskannya gerakan moderasi beragama yang digencarkan Kementerian Agama (KEMENAG) menemukan momentumnya. kiprah moderasi beragama dievaluasi penting pada menata kehidupan beragama pada rakyat Indonesia yang beragam serta majemuk. Menariknya, ternyata seluruh agama yang diakui pada Indonesia pula mengakui ajaran moderasi beragama. pada Islam misalnya, ada konsep washatiyah yang memiliki padanan makna istilah tawassuth (tengah), i'tidal (adil), dan tawazun (seimbang). Orang yang menerapkan prinsip wasathiyah mampu dianggap wasith.

KMA No 184 dan KMA No 93 tahun 2022 yang memaparkan perihal panduan penyelenggaraan penguatan moderasi beragama, hal ini juga sinkron menggunakan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "negara sesuai atas ketuhanan yang maha esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing serta untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya."

Karena Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar pada global, itu absolut menjadi sentra perhatian waktu datang ke moderasi Islam. Ajaran utama Islam merupakan moderasi. menurut Dawing (2018), Islam moderat adalah sikap teologis yang sangat krusial dalam mengendalikan keragaman dalam segala aspek, termasuk agama, budaya, ras, serta bangsa itu sendiri. Akibatnya, moderasi beragama di Indonesia harus dipahami secara kontekstual bukan tekstual, artinya moderasi beragama di Indonesia adalah cara tahu agama yang wajib moderat/toleran sebab Indonesia mempunyai poly budaya, tradisi, dan adat istiadat yang wajib dilindungi. Kehadiran heterogenitas pada bangsa Indonesia disebut pula dengan sunnatullah Allah. Terlepas berasal keragaman, Allah menciptakan landasan persatuan umat (Ummatan Wahidah). Akibatnya, pada kehidupan konkret, umat Islam diperlukan bersikap moderat (Ummatan Wasathiyyah).

Pada praktiknya, memilih jalan tengah atau moderasi dalam Islam bisa dibagi sebagai empat kategori: moderat dalam hal agama, ibadah, perangai, dan karakter, serta menantang pada penciptaan syariah. sementara itu, Harin percaya bahwa moderasi akan selalu hidup berdampingan menggunakan keseimbangan serta keadilan sebab moderasi merupakan aspek inti asal Islam (Az-Zafi, 2020). Pendidikan karakter moderasi Islami bagi anak sejak dini akan sangat mensugesti perkembangannya. Penerapan pendidikan karakter moderasi beragama tak diragukan lagi krusial dalam memberikan pencerahan dan wawasan dimulai menggunakan pendidikan di tingkat madrasah. Moderasi, dari Kementerian Agama (2019), pada buku Moderasi agama, membutuhkan keterbukaan, penerimaan, dan kolaborasi di antara banyak gerombolan, termasuk suku, budaya, serta agama. Mahasiswa yang tahu moderasi beragama akan mampu beroperasi dengan baik pada warga multikultural menjadi konsekuensinya.

Toleransi beragama tidak berarti memutarbalikkan keterangan atau menghilangkan identitas satu sama lain. insan masih memiliki pendapat yang bertenaga ihwal sesuatu, tentang kebenaran, ihwal legalitas suatu situasi, tetapi dalam moderasi beragama, manusia lebih mendapatkan gagasan bahwa terdapat masyarakat negara lain pada luar kita yang memiliki hak yang sama menggunakan kita, sesuai kebangsaan., menjadi masyarakat yang berdaulat. di luar keyakinan atau agama, setiap orang memiliki keyakinan yang wajib diakui serta dihargai. dari Schwartz (2007), dua paras Islam tidak bisa dipisahkan berasal proses epistemologis yang mereka lalui, yang secara sosial budaya beragam:

paras Islam yang ramah, bersahabat, toleran, serta inklusif yang ingin hidup berdampingan menggunakan Islam.

Dewasa ini, minimnya minat untuk membenarkan fakta atau ilmu agama yang mudah diperoleh anak muda, khususnya mahasiswa, membuat bingung sikap mereka. sebagai model, penelitian PPIM UIN Jakarta (2017) terhadap mahasiswa, pengajar, serta dosen asal 34 provinsi pada Indonesia menemukan bahwa 34, tiga persen responden menunjukkan permusuhan terhadap orang non-agama (non-Muslim). Selain hasil yang meresahkan, 48, 95 % responden mahasiswa menyatakan bahwa pelajaran agama memicu rasa jijik mereka terhadap agama yang tidak mereka setujui. 58, 55 persen responden mahasiswa menunjukkan pandangan agama yang intens serta obsesif, yang mengejutkan. artinya dia hanya menegaskan apa yang beliau pahami dan tidak sependapat dengan penafsiran orang lain (PPIM UIN Jakarta, 2017). Beberapa kajian ihwal intoleransi, anti kebhinekaan, serta radikalisme pada sekolah dan madrasah telah dilakukan oleh banyak sekali forum pendidikan. Mereka biasanya sepakat bahwa radikalisme bisa masuk ke lingkungan sekolah melalui jalur berikut: peran guru pada membimbing peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, bahan ajar yang diduga mengandung muatan intoleransi, serta kuatnya doktrin alumni dalam kegiatan peserta didik yang dilakukan pada sekolah maupun pada luar sekolah. Sekolah, aktivitas intrakurikuler atau ekstrakurikuler mirip Spiritualitas Islam (rohis), dan kebijakan prinsip yang kurang mengharapkannya (Rofik & Misbah, 2021).

Buat mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan sekolah, Muhidin, dkk (2020) berkata madrasah harus mengadopsi aneka macam aktivitas, Pertama, membuatkan budaya sekolah lokal yang meliputi nilai-nilai mirip kejujuran, saling menghormati, sopan santun, dan sebagainya. Budaya sekolah merupakan seperangkat nilai, perkiraan, pemahaman, keyakinan, dan asa beserta yang dipergunakan menjadi pedoman sikap pada memecahkan persoalan baik secara individu juga kolektif. baik langsung maupun kolektif Mereka menghadapi duduk perkara internal juga eksternal. sementara itu, pelatihan wasathiyah (tengah) pada sekolah sangat penting menjadi landasan nilai, sikap, semangat, serta perilaku bagi guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan siswa itu sendiri dalam rangka menciptakan budaya religius di lingkungan sekolah. kedua, sekolah wajib berperan aktif pada pembicaraan atau obrolan keagamaan antarumat beragama sejak dini guna membangun saling pengertian pada antara anak-anak yang tidak sinkron pandangan agama. Jenis ihwal lintas agama ini ialah cara yang efisien bagi peserta didik buat membiasakan diri bercakap-cakap menggunakan para praktisi aneka macam agama. Ketiga, kurikulum dan kitab teks yang dipergunakan di sekolah sangat vital pada implementasi moderasi beragama, terutama kurikulum yang memuat pluralisme (Bhinneka Tunggal Ika) serta toleransi beragama. Literatur agama yang digunakan di kelas jua harus menjadi karya yang membantu anak-anak berbagi dialog dan gagasan tentang apresiasi keragaman yang inklusif serta wajar.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini dirasa perlu buat menyelidiki kesiapan acara moderasi beragama di lingkungan sekolah/madrasah. dibutuhkan dengan menanamkan nilai-nilai budaya keagamaan ke dalam lingkungan sekolah, serta kepedulian yang bertenaga asal para pengajar serta pengelola lembaga pendidikan, siswa akan mengembangkan ketakwaan individu dan sosial, sehingga memungkinkan mereka menciptakan moral, peradaban, dan karakter bangsa yang bermartabat pada lingkungan sekolah dimasa yang akan datang.

METODE

Dalam Penelitian ini, Peneliti menggunakan teknik kualitatif menggunakan gaya penelitian deskriptif guna menganalisis kesiapan program moderasi beragama pada banyak sekali sekolah/madrasah di Indonesia. Pendekatan penelitian kualitatif pada hakikatnya merupakan proses investigasi, ialah kita dapat tahu kenyataan sosial secara bertahap sebelum menerapkannya, tak jarang menggunakan membandingkan, membandingkan, merefleksi, dikategorikan, dan mengklasifikasikan item-item studi. dari Moleong (1989), analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan memasak data, mengorganisasikan data, mengklasifikasikannya menjadi bagian-porsi yang bisa diatur, meringkas, mencari, dan menemukan pola, mengevaluasi apa yang signifikan, apa yang sudah dipelajari, dan memilih apa yang akan diajarkan diinformasikan pada orang lain guru berasal beberapa sekolah/madrasah di Indonesia menyediakan data buat penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan membuatkan informasi lapangan terbuka pada guru di beberapa sekolah/madrasah di Indonesia. Responden diajukan 35 pertanyaan perihal sekolah/madrasah kesiapannya buat menaikkan penerapan moderasi beragama.

Sedangkan pada termin analisis data, peneliti secara deskriptif menelaah serta melaporkan akibat penelitian menggunakan memakai model alur Milles & Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, pembuktian, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994). Penyajian data atau representasi data merupakan kumpulan informasi yang sistematis asal mana konklusi bisa ditarik. Hal ini dilakukan sebab data yang dikumpulkan selama metode penelitian kualitatif umumnya berupa cerita, yang wajib disederhanakan tanpa kehilangan makna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Moderasi Beragama dan Peran Sekolah

Kata moderat di bahasa Arab dikenal dengan al-wasathiyah. pada pada Al-Qur'an ada sebuah istilah yang termaktub berasal Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat: 143. istilah al-Wasath pada ayat ini memiliki makna yang paling baik atau paling sempurna. pada sebuah hadits yang sangat terkenal pula disebutkan bahwa dilema yang paling baik merupakan yang berada pada tengah- tengah. agama atau sekte. Islam moderat selalu menjunjung tinggi toleransi, saling menghormati, dengan tetap meyakini kebenaran keyakinan masing-masing agama serta

sekte. Sebagai akibatnya semua bisa mendapatkan keputusan menggunakan kepala dingin, tanpa harus terlibat aksi anarkis (sewendi: 2021).

Hashim Kamali menegaskan bahwa moderasi tidak tanggal dari 2 istilah kunci lainnya, yaitu balanced (ekuilibrium) serta fair (keadilan). Moderasi bukan berarti kita berkompromi menggunakan prinsip-prinsip utama (ushuliyah) ajaran agama yang diyakini demi toleransi bagi pemeluk agama lain; moderat artinya "… keyakinan, ekuilibrium yang benar, serta keadilan…" Tanpa keseimbangan serta keadilan seruan moderasi beragama tak akan efektif. Jadi, menjadi moderat berarti bahwa setiap orang tidak boleh ekstrem dalam sudut pandangnya sendiri. Keduanya harus mendekat serta menyatukan titik temu.

Jika ekstremitas terdapat di satu pihak, dan moderasi beragama tidak terdapat, intoleransi serta pertarungan beragama akan tetap menjadi "bara pada pada sekam", yang sewaktu-saat mampu

meledak, apalagi Bila dipicu oleh arus politik. sebab, mirip yang ditekankan Kamali pada atas: “moderasi artinya ihwal menyatukan sentra-sentra yang berbeda daripada mencari keseimbangan yang tepat pada mana orang-orang dari budaya, agama, serta politik yang tidak selaras saling mendengarkan serta belajar bagaimana menyelesaikan perbedaan mereka” Moderasi adalah esensi ajaran berasal Islam. Islam moderat ialah paham keagamaan yang sangat relevan dalam konteks kebhinekaan pada segala aspek, baik itu agama, adat tata cara, suku bangsa dan bangsa itu sendiri. Bukan hanya itu, keberagaman agama artinya liputan sejarah dalam Islam. Keberagaman ini antara lain disebabkan adanya dialektika antara teks dan realitas itu sendiri, serta cara pandang terhadap posisi nalar serta wahyu pada memecahkan suatu persoalan. Konsekuensi logis asal kabar ini artinya munculnya istilah-kata yang mengikuti di belakang istilah Islam. misalnya, Islam mendasar, Islam Liberal, Islam Progresif, Islam Moderat, dan lain sebagainya.

Dalam Al-Qur’an terdapat beberapa ayat yang menunjukkan misi Islam, ajaran Islam, dan umat Islam. Misi agama ini artinya menjadi rahmat bagi alam semesta (rahmatan lil 'alamin), QS.al-Anbiya': 107. ajaran Islam merupakan agama yang sesuai dengan kemanusiaan (fitrah), QS.al- Rum: 30, sedangkan umat Islam merupakan orang yang moderat (ummatan wasatan), QS. Al-Baqarah: 143. Selain itu, terdapat juga ayat-ayat yang memerintahkan umat Islam buat berpihak di kebenaran (hanîf), QS. al-Rûm: 30, dan menegakkan keadilan (QS. al- Maidah: 8) serta kebaikan supaya menjadi umat yang terbaik (khair ummah), QS. Ali 'Imran:

110. Ayat-ayat ini menguatkan perlunya sikap moderat beragama (tawassuth) yang digambarkan menjadi wasathan umat, sebagai akibatnya saat ini banyak ulama yang memberikan konsep moderasi Islam (wasathiyyah al-Islâm). Memang terdapat jua gerombolan Islam yang tak setuju dengan konsep moderasi ini, sebab disebut menjual agama kepada pihak lain.

Sebab moderasi ini menitikberatkan pada perilaku, maka bentuk moderasi pula mampu tidak sama antara satu tempat dengan kawasan lainnya, sebab pihak yang berkonfrontasi dan

dilema yang dihadapi tidak sama antara satu negara menggunakan negara lain. di negara-negara dominan Muslim, moderasi meliputi: mengakui eksistensi pihak lain, toleransi kepemilikan, menghormati disparitas pendapat, serta tidak memaksakan kehendak melalui kekerasan. Hal ini didasarkan di ayat-ayat al-Qur'an, diantaranya menghargai kemajemukan dan kemauan buat berinteraksi (QS. al-Hujurât: 13), mengungkapkan agama secara bijak dan santun (QS. al-Nahl: 125), prinsip kemudahan sesuai kemampuan (QS.al-Baqarah: 185, al-Baqarah: 286 serta QS.al-Taghâbun: 16).

Konsep Moderasi Beragama dan Peran Sekolah

wajib dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara praktik agama itu sendiri (eksklusif) dan penghormatan terhadap praktik keagamaan orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik keagamaan ini niscaya akan menjauhkan kita dari perilaku ekstrim, fanatik serta revolusioner pada beragama. mirip telah dikemukakan sebelumnya, moderasi beragama artinya solusi atas hadirnya 2 kutub ekstrem dalam agama, ultrakonservatif atau ekstrem kanan di satu sisi, serta liberal atau ekstrem kiri pada sisi lain.

Konsep Moderasi Beragama dan Peran Sekolah

sebenarnya adalah kunci untuk membangun toleransi dan kerukunan, baik pada taraf lokal, nasional maupun global. Pilihan moderasi menggunakan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama ialah kunci ekuilibrium, demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Maka, setiap umat beragama dapat saling menghormati, menerima disparitas, serta hayati beserta secara hening dan harmonis. dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama mungkin bukan pilihan, akan tetapi kebutuhan.

Institusi pendidikan sangat tepat menjadi "laboratorium moderasi beragama". mirip yang telah dipahami bahwa bangsa Indonesia artinya bangsa yang memiliki beragam suku serta agama. Indonesia memiliki ciri yang unik, namun penuh dengan tantangan. bahwa pandangan eksklusif serta tindakan ekstrimisme kekerasan berkedok agama akan Mengganggu tatanan serta tatanan bangsa yang majemuk.

Pada sinilah pentingnya "batu pertama" moderasi beragama dibangun atas dasar filosofis universal dalam korelasi sosial insan. Institusi pendidikan ialah sarana yang tepat buat menyebarkan kepekaan siswa terhadap aneka macam perbedaan. Membuka ruang obrolan, guru memberikan pemahaman bahwa agama membawa pesan cinta bukan benci dan sistem sekolah tanggal berasal perbedaan tadi. tidak hanya itu, galat satu yang sebagai sebuah

Rekomendasi selebaran Jakarta ialah pemerintah wajib memimpin gerakan penguatan agama moderat sebagai arus utama, dengan mengedepankan pentingnya kehidupan beragama moderat menjadi tuntunan spiritual serta moral. Pada beberapa tahun terakhir, kecenderungan kita terhadap intoleransi semakin menguat, baik secara internal pada kalangan umat beragama juga secara eksternal. kasus penganiayaan, pembakaran rumah ibadah, dan segala bentuk tindak kekerasan sering dikedepankan, tawuran antar pelajar menjadi paras buram

bagi institusi pendidikan kita.

Contohnya, penelitian Maarif Institute (2011), Setara Institute (2015), serta Wahid Foundation (2016) menunjukkan bahwa gerombolan radikal sudah secara masif merambah pandangan radikal di kalangan generasi muda melalui lembaga pendidikan. lalu beberapa observasi diperkuat yang memberikan bahwa siswa serta peserta didik cenderung intoleran dan radikalisme relatif habis, begitu jua dengan guru. tanda-tanda intoleransi dan radikalisme berbasis agama akan cenderung lebih akbar dari berita etnisitas. kemudian intoleransi dan radikalisme pula terjadi di media sosial.

Pada buku terbitan Maarif Institute, Protecting the Fortress of Diversity in Schools, terdapat 3 pintu utama bagaimana paham radikal dan intoleransi merambah lingkungan sekolah; Pertama, kegiatan ekstrakurikuler. kedua, kiprah pengajar pada proses belajar mengajar. Ketiga, melalui kebijakan sekolah yang lemah pada mengontrol masuknya radikalisme di sekolah. Jika melihat data dan temuan tadi, kesamaan intoleransi dan menguatnya radikalisme pada sekolah sangat memprihatinkan. sang karena itu, disinilah strategi pengarusutamaan moderasi beragama perlu dilakukan.

Ruang sekolah sebenarnya merupakan tempat penyemaian gagasan kebangsaan, penanaman nilai-nilai multikultural, membawa pesan-pesan agama lebih damai, serta membuatkan cinta humanisme. Hal ini terwujud dalam kurikulum yang berorientasi di moderasi beragama.

Sekolah setidaknya sebagai ruang perkenalan antara NU dan Muhammadiyah, terutama sekolah negeri dan sekolah swasta yang berhubungan menggunakan kedua ormas tersebut. Padahal kita sudah mempunyai kapital sosial yang bertenaga, pluralitas masyarakat artinya potret bangsa kita. Ormas Islam moderat pada Indonesia perlu mengambil kiprah aktif karena sama- sama kalah pamor menggunakan ideologi transnasional yang menginginkan perubahan sistem politik Indonesia. Mereka lebih setia pada gerakan dan menolak pluralisme Indonesia, misalnya ingin menjadikan Indonesia menjadi khilafah Islam atau terdapat yang mempromosikan Republik Islam Indonesia. ke 2 grup itu lupa bahwa kita sudah putusan bulat ihwal Pancasila serta UUD 1945.

Ada beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan pemerintah; pertama, moderasi beragama harus menjadi perhatian pemerintah dalam membuat narasi planning pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN), sebagai keseriusan pemerintah pada mendorong moderasi beragama di kalangan umat beragama di Indonesia. ke 2, melibatkan lembaga pendidikan: pondok pesantren, madrasah dan sekolah dan perguruan tinggi dan forum non formal lainnya pada penguatan nilai kemanusiaan, nilai kerukunan beragama dan moderasi beragama. Ketiga, membuatkan literasi agama dan pendidikan lintas agama. Keempat, sekolah wajib menaikkan pengamalan pengalaman keagamaan yang tidak sinkron sehingga kita dapat menjalin kerja sama antar pemeluk agama (Irawan: 2020).

Kesiapan ASN dan Pelaksana Kebijakan

Berdasarkan hasil angket yang dilakukan pada beberapa pengajar madrasah tentang tujuan penguatan dan peningkatan nilai-nilai moderasi beragama pada lingkungan ASN, dominan responden menyatakan bahwa tujuan penguatan moderasi beragama di lingkungan ASN artinya agar Aparatur menjadi panutan bagi masyarakat, mampu membuat undang- undang. mendukung kegiatan keagamaan moderat. Lebih lanjut, moderasi beragama, dari responden, ialah upaya mengembalikan praktik keagamaan dalam dasarnya dan bahwa agama berfungsi buat menopang harkat dan martabat manusia.

Beberapa tanggapan tambahan dari responden menyatakan bahwa menanamkan moderasi beragama pada ASN, khususnya di kalangan guru, artinya wujud harapan sekolah/madrasah buat menerapkan konsep moderasi beragama pada forum pendidikan. Selanjutnya terkait pertanyaan terkait indikator moderasi beragama, seluruh responden menjawab bahwa terdapat 4 indikator primer moderasi beragama, yaitu: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Item selanjutnya pada angket yang ditanyakan pada responden ialah wacana pentingnya pemahaman konsep moderasi beragama bagi ASN. Secara holistik, 73 responden yang memberikan jawaban menyatakan bahwa pemahaman konsep moderasi beragama sangat penting. Mereka menambahkan, hal ini dimaksudkan supaya dengan memahami pengertian moderasi beragama, ASN terhindar asal melakukan aktivitas yang bisa merugikan moderasi beragama. mengembangkan berita yang salah ihwal dilema agama, contohnya, dapat membahayakan hukum toleransi beragama di Indonesia. Temuan di atas sejalan menggunakan penelitian yang dilakukan oleh pusat Pendidikan dan pelatihan Administrasi Kementerian Agama Republik Indonesia. akibat kajian memberikan bahwa 3 puluh orang (54, lima persen) asal 55 ASN yang akan mengikuti acara moderasi beragama menyatakan memahami prinsip serta indikator moderasi beragama (Puslitbang Kemenag RI, 2021).

Pengkajian program moderasi beragama pada sekolah/madrasah tentunya tak lepas dari kiprah ASN yang membidangi lembaga pendidikan pada bawah naungan Kementerian Agama. Terkait menggunakan hal tadi, peneliti mengajukan item pertanyaan dalam angket yang diberikan kepada responden yaitu peran ASN Kementerian Agama dalam mensosialisasikan konsep moderasi beragama. berasal pertanyaan tadi peneliti menemukan jawaban yang bervariasi, responden mengatakan bahwa ASN merupakan perpanjangan tangan pemerintah buat menyampaikan pesan perihal konsep moderasi pada masyarakat. ASN Kementerian Agama diharapkan menjadi yang terdepan sebagai model penerapan nilai- nilai moderasi beragama, khususnya dalam konteks cinta tanah air. Purbajati (2020) meyakini bahwa guru memiliki peran krusial dalam inisiatif peningkatan kualitas pendidikan. sebab seorang pengajar berfungsi sebagai panutan bagi peserta didik, memiliki profesionalisme seorang pengajar sangat krusial untuk mencapai pendidikan yang hebat. ASN menjadi trafo

memiliki peran krusial pada menanamkan prinsip-prinsip moderasi beragama pada rakyat. Cara penyampaiannya bisa mulut (penerangan langsung) atau nonverbal (penjelasan tidak pribadi) atau melalui serangkaian sikap). dalam segala hal, seorang guru sebagai figur atau panutan. Demikian halnya ketika berinteraksi dengan orang lain, bereaksi terhadap situasi eksklusif, serta memahami atau menafsirkan info yang masih diperdebatkan (Kuswanto, 2014 & Purbajati, 2020). Faktor-Faktor yang mensugesti Proses Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama pada Lingkungan Sekolah/Madrasah pada penelitiannya wacana kebijakan moderasi beragama di lembaga pendidikan, Ahnaf (2013) menyatakan bahwa duduk perkara lembaga pendidikan pada mengembangkan nilai toleransi dan penghormatan terhadap keragaman agama tidak hanya

terletak di problem kurikuler tetapi juga di kemampuan pejabat sekolah.

Taktik, maksud, serta tujuan kebijakan moderasi beragama pada lingkungan sekolah wajib dipahami sang otoritas sekolah supaya kebijakan tadi dapat dilaksanakan dengan baik. Berangkat asal penjelasan pada atas, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan terkait kebijakan acara moderasi beragama pada lingkungan sekolah/madrasah. Pertanyaan pertama yang diajukan artinya bagaimana pembuat kebijakan moderasi beragama pada lingkungan sekolah memandang acara kebijakan moderasi beragama itu sendiri. dominan dari 73 responden menyatakan bahwa para pelaksana kebijakan moderasi beragama sudah memahami sepenuhnya konsep moderasi beragama. namun, beberapa responden mengakui masih ada beberapa pelaksana kebijakan yang belum memahami esensi dan pentingnya moderasi beragama itu sendiri. Studi ini menunjukkan bahwa mayoritas pengelola sekolah yang menerapkan kebijakan moderasi beragama mempunyai pengetahuan yang bertenaga wacana moderasi beragama. Visi serta tujuan madrasah wajib menjadi titik tolak pengarusutamaan moderasi Islam. Pandangan ke depan yang ideal berasal prediksi ideal artinya dengan mengingat visi. Visi artinya tujuan, sedangkan misi ialah bagaimana menuju kesana. Sebisa mungkin visi serta tujuan yang sudah ditetapkan memasukkan moderasi Islam menjadi bagian berasal profil ideal yang diasa- keinginankan. Visi serta tujuan ini seharusnya tak hanya sebagai pertunjukan atau selembar kertas; harus menjadi semangat hayati dan nafas yang menjiwai semua masyarakat madrasah. oleh sebab itu, visi dan tujuan madrasah wajib dikembangkan secara kolaboratif serta dikomunikasikan kepada semua pemangku kepentingan madrasah (Alim & Munib, 2021).

Dalam sebuah organisasi, koordinasi memiliki kiprah yang sangat krusial dan merupakan galat satu faktor pendukung yang dibutuhkan buat menggerakkan orang buat melaksanakan suatu kebijakan yang terstruktur. sebab pada dasarnya koordinasi adalah suatu bentuk kerja sama, saling menghormati serta menghargai tugas dan fungsi dan tanggung jawab masing-masing. E.F.L. Brech sebagaimana dikutip sang Hasibuan (2007) berkata "koordinasi artinya buat menyeimbangkan dan menggerakkan tim dengan menyediakan lokasi yang sesuai buat kegiatan kerja masing-masing serta menjaga supaya aktivitas tadi dilakukan secara serasi di antara para anggota itu sendiri". buat mensukseskan program moderasi beragama pada

lingkungan sekolah/madrasah tentunya diperlukan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan. Koordinasi tentunya dibutuhkan buat mewujudkan visi dan misi aplikasi program moderasi beragama di sekolah/madrasah. Kaitannya menggunakan penerapan kaidah moderasi beragama pula sama, membutuhkan korelasi yang solid antara komponen sekolah serta madrasah mirip tokoh agama, orang tua, siswa, serta lain-lain. buat itu, lembaga pendidikan dituntut buat terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait. Berkaitan menggunakan uraian di atas, peneliti menemukan bahwa koordinasi yang dilakukan sang beberapa sekolah dan madrasah di Indonesia dalam rangka mewujudkan program moderasi beragama masih belum berjalan. Ini wajib menjadi prioritas utama bagi pembuat kebijakan di setiap sekolah. tak diragukan lagi, ini mungkin salah satu elemen yang menghambat efektivitas program moderasi beragama di lingkungan sekolah/madrasah Jika tidak ada koordinasi yang memadai.

Koordinasi Sekolah Dapat Berbentuk Koordinasi Eksternal Maupun Internal. Koordinasi eksternal meliputi kerja sama dengan Kementerian Agama, tokoh agama, warga, serta sebagainya. Koordinasi internal dapat berupa kerja sama antara ketua sekolah, pendidik, staf, dan siswa. namun asal yang akan terjadi penyebaran angket, peneliti pula menemukan bahwa di beberapa sekolah/madrasah di Indonesia koordinasi telah berjalan meskipun dirasa belum optimal. berdasarkan temuan tadi, koordinasi wajib menjadi salah satu prioritas utama pada menerapkan kebijakan moderasi beragama di sekolah buat membentuk Integrasi, Sinkronisasi, serta Penyederhanaan buat mencapai tujuan acara moderasi beragama seefektif serta seefisien mungkin.

Koordinasi memudahkan pimpinan buat mensinergikan serta mengintegrasikan tugas saat ini menggunakan pihak terkait. Mendukung pimpinan pada mensinergikan serta mengendalikan tumbuh kembang pelaksanaan program moderasi beragama antara satu unit dengan unit lainnya pada lingkungan sekolah serta madrasah. Pemimpin bisa mengkoordinasikan operasi fungsional menggunakan aneka macam tujuan masing-masing unit buat mencapai tujuan bersama seefektif dan seefisien mungkin dengan memanfaatkan asal daya yang tersedia.

Selain koordinasi, buat mempersiapkan implementasi kebijakan moderasi beragama pada sekolah/madrasah, terdapat pula galat satu faktor yang tidak kalah pentingnya, yaitu adanya panduan yang kentara ihwal hak, dan kewajiban (kewenangan) ASN dalam penguatan agama. moderasi. panduan yang kentara wacana hak dan tanggung jawab ASN pada lingkungan sekolah/madrasah relevan dengan teori "pelembagaan serta aplikasi moderasi beragama" yang menyatakan bahwa memiliki pedoman yang jelas bagi pegawai merupakan keliru satu cara buat menerjemahkan moderasi beragama ke pada institusi, struktur, atau institusi. unit yang mempertimbangkan

menggunakan cermat pilihan buat menerjemahkan ae ini ke pada program serta kegiatan yang terukur serta berkelanjutan. oleh karena itu, para akademisi

meyakini bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) harus berada di garda terdepan pada menjaga dan mempromosikan moderasi beragama di lingkungan sekolah. menjadi pelaksana, Aparatur Sipil Negara harus mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip inti ajaran agama, meningkatkan toleransi, mempertinggi loyalitas kepada negara, serta menolak segala bentuk kekerasan beragama (Litiloly, 2020).

Namun berdasarkan temuan peneliti terungkap bahwa secara umum dikuasai responden menyatakan bahwa selama ini para pelaksana kebijakan moderasi beragama pada sekolah belum memiliki panduan spesifik mengenai hak serta kewajiban (kewenangan) ASN dalam memajukan moderasi beragama bahkan meskipun di beberapa sekolah/madrasah pelaksana kebijakan telah memiliki pedoman yang kentara. bisa mengatur serta menjabarkan hak serta kewajiban ASN dalam implementasi kebijakan moderasi beragama. Lebih lanjut, lebih banyak didominasi responden ASN pula berkata bahwa selama ini pada beberapa sekolah/madrasah belum ada SOP (standard operating procedure) yang kentara dari para pelaksana kebijakan mengenai penerapan moderasi dalam program moderasi beragama. keberadaan SOP sangat diharapkan untuk secara khusus memperjelas atau menetapkan anggaran tentang kiprah, tanggung jawab, serta fungsi ASN dalam mencapai acara moderasi beragama di sekolah atau madrasah.

Mengingat perlunya penerapan SOP pada acara moderasi beragama, banyak sekali manfaat atau laba dapat diperoleh asal SOP tadi. Hal ini dimungkinkan selama SOP diikuti dengan benar. SOP yang kurang memadai Mengganggu proses pencapaian tujuan serta misi program moderasi beragama. Jadi, Bila SOP diikuti menggunakan benar, lembaga pendidikan (dalam hal ini sekolah/madrasah) akan bisa menjalankan acara dengan baik (Fajar Nur'Aini, 2016). di sisi lain, ASN pula berkata selama ini dalam aplikasi program moderasi beragama, para guru hanya mendengarkan serta menyelidiki ideologi negara untuk menciptakan kerukunan antarumat beragama.

Fasilitas Teknologi dan Dukungan Infrastruktur

Pengaruh era digital terhadap praktik keagamaan rakyat, berdasarkan buku Heidi Campbell When Religion Meets New Media (2010), ialah memudarnya kesetiaan kepada organisasi keagamaan, pergeseran otoritas keagamaan, meningkatnya individualisme, dan perubahan dari pluralisme ke tribalisme. Bila Indonesia, negara Muslim terbesar pada dunia, ingin sebagai laboratorium perdamaian, wajib terus mengarusutamakan moderasi Islam melalui forum diskusi serta platform internet. Indonesia, sebagaimana diketahui, adalah negara yang majemuk serta kosmopolitan menggunakan banyak sekali suku, agama, bahasa, ras, serta varian lainnya. Meskipun demikian, varietas ini memungkinkan untuk hayati berdampingan secara serasi. Berangkat berasal uraian pada atas, peneliti memasukkan item pertanyaan terkait fasilitas teknologi berita serta komunikasi yang telah dimiliki oleh para pelaksana kebijakan program moderasi beragama pada sekolah/madrasah.

Asal butir pertanyaan tersebut peneliti memperoleh hasil bahwa di umumnya sekolah/madrasah pada Indonesia telah memiliki wahana serta prasarana teknologi yang memadai buat mendukung

pelaksanaan program moderasi beragama. tetapi kebalikannya, sebagian mungil responden menyatakan bahwa forum pendidikan daerah mereka berada belum mempunyai fasilitas teknologi yang memadai buat mendukung program moderasi beragama. Beberapa faktor penyebab minimnya teknologi yang bisa dimanfaatkan, diantaranya letak sekolah atau madrasah yang terpencil dan jaringan internet yang buruk sehingga guru dan ASN belum dapat memanfaatkan teknologi secara optimal. Melalui kancah digital, integrasi moderasi beragama di sekolah/madrasah di seluruh Indonesia berupaya membawa sesuatu yang sebelumnya berada pada pinggiran, yang hanya diketahui segelintir orang serta organisasi, dan bahkan kurang esensial, ke tengah, di mana bisa menjadi sentra. inti. tengah. seluruh masyarakat mampu melihatnya. dicerna dan dilakukan (Hefni, 2020). Hal ini dilakukan melalui pemanfaatan ruang digital, yang memiliki beberapa tujuan, aplikasi, kapasitas, dan potensi.

Anggaran dan Keberlanjutan Program

Pada skala besar serta kecil, anggaran tidak dapat dipisahkan berasal pengadaan suatu kegiatan. pengenalan moderasi beragama memegang peranan penting pada setiap aktivitas yang tentunya membutuhkan anggaran, tetapi pelaksanaan penganggaran seringkali berbenturan dengan aneka macam proses serta anggaran. di tahun 2022, Yandri Susanto, ketua Komisi VIII dpr RI, menyebutkan anggaran moderasi beragama lintas direktorat jenderal tahun ini sebanyak Rp tiga, 2 triliun (Permana, 23 September 2021). program Moderasi Keagamaan adalah galat satu asal tujuh kebijakan primer yang dikembangkan Kementerian Agama berdasarkan penataan tugas dan fungsi seluruh entitas lingkungan.

Pilar dasar pembangunan nasional yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024 adalah moderasi beragama. yang cukup disayangkan adalah masih cukup banyak ASN di lingkungan sekolah/madrasah yang tidak mengetahui secara khusus besaran total anggaran buat acara moderasi beragama ini. namun Jika dilihat asal total anggaran yang terdapat, hal ini membagikan keseriusan para pengambil kebijakan dalam melaksanakan acara moderasi beragama, khususnya di lingkungan sekolah/madrasah. Para guru jua mengakui bahwa sekolah/madrasah belum memiliki strategi cadangan yang mampu diterapkan Bila anggaran yang tersedia tidak mencukupi buat memperkuat moderasi beragama.

Komitmen dan Budaya Sekolah

Moderasi agama membutuhkan kesabaran. Setiap individu wajib menerima sepenuhnya tindakan yang dilakukan Kementerian Agama buat memajukan moderasi beragama, khususnya di sekolah, sebagai nilai seorang yang beragama terhadap agama yang dianutnya. Inisiatif ini akan efektif Bila didukung oleh seluruh pihak. pihak, termasuk tidak hanya pemerintah namun juga pemangku kepentingan menggunakan cakupan yang lebih sempit, seperti famili dan

sekolah. Penguatan moderasi beragama pada sekolah/madrasah wajib dimulai menggunakan tekad seluruh pihak buat bekerja sama supaya terbiasa berinteraksi dengan semua golongan serta tidak terkesan hanya berdiri pada satu grup.

Dedikasi ini telah dibuktikan sang Kementerian Agama Republik Indonesia yang mengatakan bahwa Kementerian Agama adalah kementerian seluruh agama. Tinggal bagaimana semua bawahannya menerapkan etos ini di forum pendidikan. Sejalan dengan uraian di atas, temuan peneliti

juga menunjukkan bahwa para pelaksana kebijakan di taraf sekolah dan madrasah pada Indonesia telah berkomitmen penuh buat memperkuat moderasi beragama. buat mendorong moderasi beragama diterapkan pada anak, para pelaksana kebijakan pada sekolah harus membuat komitmen yang kuat. Akibatnya, budaya berpikir moderat akan timbul menjadi dampak berasal budaya berpikir siswa (Fauzian, dkk, 2021).

Pendekatan pembiasaan, dengan perilaku rutin, spontan, dan keteladanan, digunakan buat membuatkan moderasi beragama dalam mata pelajaran, muatan lokal, serta aktivitas ekstrakurikuler. perilaku ini ialah akibat budaya siswa serta dapat digunakan dan diimplementasikan dalam situasi sosial (pemberdayaan). akibat Penguatan Moderasi Beragama Melalui Kearifan Lokal pada Upaya Mewujudkan Budaya Berpikir Moderat di Kalangan peserta didik Melalui KMA 184, Kemenag sudah mendorong moderasi beragama dalam kurikulum madrasah. Konsep pengarusutamaan memasukkan moderasi beragama berupa kearifan lokal ke dalam kurikulum. Lebih lanjut, para responden pula mengungkapkan bahwa tidak hanya pimpinan saja yang mempunyai komitmen tinggi, namun seluruh anggota pada setiap unit juga mendukung penuh penguatan implementasi moderasi beragama.

Pelaksanaan, Evaluasi, dan Kemitraan

Dalam pelaksanaan penguatan moderasi beragama, empat perilaku yang dapat dipergunakan buat mengukur pencapaian moderasi beragama: komitmen nasional, toleransi, non-kekerasan, dan penerimaan tradisi. Keempat sikap tadi bisa dijabarkan lebih rinci yang selanjutnya bisa dijadikan acuan buat mengukur keberhasilan program ini. Satu hal yang disayangkan artinya masih poly sekolah serta madrasah yang tidak mempunyai kriteria baku menjadi acuan buat melihat keberhasilan kebijakan moderasi beragama di sekolah- sekolah tersebut. Hal ini tentunya sedikit menyulitkan pelaksana kebijakan dan guru buat mengukur dan mengevaluasi keberhasilan acara yang dijalankannya. Proses evaluasi, dari responden, jua tak dilakukan secara rutin setiap tahun. Hal ini tentunya menyulitkan sekolah/madrasah yang bersangkutan buat dapat merogoh langkah-langkah pemugaran strategi pada menerapkan kebijakan moderasi beragama pada sekolah. hasil data yang diperoleh dari kuesioner pula berkata bahwa sekolah/madrasah belum menjalin Kerja Sama (MOU) menggunakan instansi lain.

Seperti diketahui, kerja sama dengan banyak sekali pihak dibutuhkan buat mencapai tujuan program moderasi beragama. galat satu pihak yang dapat dijadikan kawan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan acara moderasi beragama merupakan forum Kerukunan Umat

Beragama (FKUB). lembaga Kerukunan Umat Beragama artinya lembaga yang dibuat oleh rakyat serta didukung oleh pemerintah buat membentuk, memelihara, dan memperkuat gerombolan -kelompok agama guna menumbuhkan kedekatan dan kesejahteraan (Rofik & Misbah, 2021). Pembentukan FKUB sesuai Peraturan beserta nomor 8 dan 9 Tahun 2006 sang Menteri dalam Negeri dan masing-masing Menteri agama. Pentingnya FKUB dalam menjaga kedekatan umat beragama sangat krusial. FKUB menjadi wadah bagi tujuan dan tantangan yang terjadi menjadi akibat berasal aktivitas yang sudah dilaksanakan.

KESIMPULAN

Madrasah dinilai sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang relatif berhasil menanamkan Islam moderat kepada para pelajar. Moderasi beragama dengan nilai-nilai karakternya telah menjadi perilaku dan budaya seluruh warga madrasah. Madrasah dapat menjadi contoh pendidikan moderasi beragama bagi lembaga pendidikan lainnya. Berdasarkan temuan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar sekolah/madrasah masih belum siap untuk melaksanakan program moderasi beragama. Hal ini dibuktikan dengan beberapa indikator yang belum terpenuhi oleh sekolah dan madrasah terkait untuk mencapai tujuan keberhasilan program moderasi beragama. Pembuat kebijakan dan pelaksana harus memperhatikan jenis ketidaksiapan ini.

Proses perbaikan dan peninjauan ini tidak diragukan lagi penting jika program moderasi beragama ini ingin berhasil. Salah satu sektor yang harus diperhatikan oleh para pemangku kepentingan terkait dengan tidak adanya mitra kerja sama yang dapat bersinergi dengan sekolah/madrasah dalam melaksanakan dan mengoptimalkan kebijakan moderasi beragama yang telah dicanangkan Kementerian Agama.

Pengoptimalan upaya dalam dunia pendidikan terhadap pengimplementasian kurikulum moderasi beragama juga sangat penting dilakukan untuk keberhasilan tujuan dari di canangkannya progra moderasi beragama ini, supaya tidak terkesan hanya menghabiskan dana saja. 3, 2 Triliun bukan angka yang kecil jika wacana ini hanya menjadi formalitas dalam pelaksanaanya dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja.

REFERENSI

Alim, M. S., & Munib, A. (2021). Aktualisasi Pendidikan Moderasi Beragama di Madrasah. Jurnal PROGRESS: Wahana Kreativitas dan Intelektualitas, 9(2), 263. https: //doi.org/10.31942/pgrs.v9i2.5719

Anggaran Moderasi Beragama Dari Rp 400 M Jadi Rp 3, 2 T |Republika online. (2021, September 23). Republika Online. https: //republika.co.id/berita/qzvo84335/anggaran- moderasi-beragama-dari-rp-400-m-jadi-rp- 32-t

Dawing, D. (2018). Mengusung moderasi Islam Di tengah masyarakat multikultural. Rausyan Fikr: Jurnal Studi Definisi Koordinasi Di Dalam Objek Organisasi Menurut Para Ahli. (n.d.). Materi Belajar. https: //www.materibelajar.id/2016/01/definisi-koordinasi-di-dalam-objek.html

Faisal, M. (2020). Manajemen Pendidikan Moderasi Beragama Di Era Digital. Journal ofInternational Conference On Religion, Humanity and Development,

Fajar Nur'aini D.F., M. (2019). Panduan Lengkap Menyusun SOP & KPI. Anak Hebat Indonesia. Fauzian, R., Ramdani, P., & Yudiyanto, M. (2021). Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal Dalam Upaya Membentuk Sikap Moderat Siswa Madrasah: Moderasi Beragama. AL-WIJDÁN: Journalof Islamic Education Studies, 6(1),

Hasyim, N. M. (2018). Tasawuf dan Internalisasi Moderasi Beragama dalam MenghadapiProblematika Bangsa. Jurnal Analisis,

Hefni, W. (2020). Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Jurnal Bimas Islam,

Hefni, W. (2020). Moderasi Beragama dalam Ruang digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi

Beragama DiPerguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Jurnal Bimas Islamhttp://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/alwijdan/article/view/933

Ilmu Ushuluddin dan Filsafat, 13(2), 225-255. https: //doi.org/10.24239/rsy.v13i2.266 Ismail, Faisal. (2014). Dinamika Kerukunan Anarumat Beragama. Jakarta: PT RemajaRosdakarya.

Kementerian Agama RI (2019). Moderasi Beragama, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian AgamaRI

Kementerian Agama RI. (2019). Tanya Jawab Moderasi Beragama (1st ed.).Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. SAGE.Moleong, L. J. (1989). Metodologi penelitian kualitatif.

Muhammad Nur Rofik, & Misbah, M. (2021). Implementasi program Moderasi Beragama Yang Dicanangkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Di Lingkungan Sekolah. Lectura: Jurnal Pendidikan, 12(2), 230-245. https: //doi.org/10.31849/lectura.v12i2.7611

Muhidin, M., Makky, M., & Erihadiana, M. (2021). Moderasi Dalam Pendidikan Islam Dan Perspektif Pendidikan Nasional. Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, 4(1), 22-33.

PPIM UIN Jakarta. (2017). Redam Radikalisme Butuh Pendidikan Keagamaan Inklusif, Rabu, 8 November 2017dari https: //uinjkt.ac.id.

Purbajati, H. I. (2020). Peran Guru Dalam Membangun Moderasi Beragama di Sekolah.https: //doi.org/10.14421/qh.2020.2101-02 Campbell, H. (2010). When religion meets new media. Routledge.

Schwartz, S. S., Ariev, H., Buchori, A., Zaman, A. N., & Foundation., L. (2007). Dua wajah Islam: Moderatisme vs fundamentalisme dalam wacana global.

Suwendi. (2021). Moderasi beragama dan layanan Keagamaan. Bantul: Ladang Kata. Muhshi, Adam. (2015). Hukum HAM Atas Kebebaan BERAGAMA di Indonesia. Yogyakarta:

Umam, Fawaizul. (2015). Kala Beragama Tak lagi Merdeka. Bandung Prenadamedia group Irawan, I. K. A. (2020). Merajut Nilai-nilai Kemanusiaan melalui Moderasi Beragama.